



**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 (Tahap I)
Empat Belas Pemda Raih Opini WTP**

Bandung – Humas dan TU Perwakilan

Memasuki hari ke-22 bulan Ramadhan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan serangkaian acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester I Tahun 2019 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Penyerahan LHP BPK Tahap I dilaksanakan pada hari Senin (27/05). Pada kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan 14 LHP kepada 14 entitas pemeriksaan, yaitu Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Subang, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Cirebon, dan Pemerintah Kota Sukabumi.

Penyerahan LHP BPK dilakukan secara terbuka dan bertempat di Auditorium Lantai 5 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jl. Moch Toha No.164 Bandung. LHP BPK diserahkan langsung oleh **Auditor Utama Keuangan Negara V, Dr. Bambang Pamungkas MBA., CA, Ak.** kepada Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan Pimpinan Daerah atau yang mewakili pada masing-masing entitas pemeriksaan. Pada kesempatan kali ini, penyerahan LHP tersebut disaksikan oleh **Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, S.ST., M.Acc., Ak.**

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan. Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya adalah permasalahan dalam pengadaan barang jasa yang menimbulkan indikasi kerugian daerah, pengelolaan rekening yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan potensi kecurangan, pengelolaan aset tetap yang masih bermasalah baik secara penatausahaan maupun pemanfaatannya, dan permasalahan pengelolaan PBB P2 yang sampai sekarang masih banyak yang belum tuntas. Permasalahan-permasalahan tersebut masih ditemukan namun nilainya tidak material sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada keempatbelas Pemerintah Daerah yang menerima LHP BPK pada Senin (7/05). Ini berarti terdapat dua Pemerintah Daerah yang tahun ini memperoleh peningkatan opini, yaitu Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Kota Bandung.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan sesuai rencana aksi (*action plan*) yang telah disampaikan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi dan pelaksanaan *action plan* melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (**/humas bpk)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TU
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Contact Person :

Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Telepon (022) 5207294 / 0896-6228-6939
e-mail : humasbdg@gmail.com
website: www.bpk.go.id dan www.bandung.bpk.go.id